

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kulon Progo

1. Kondisi Geografis Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang terdiri dari lima kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat provinsi tersebut, dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates.

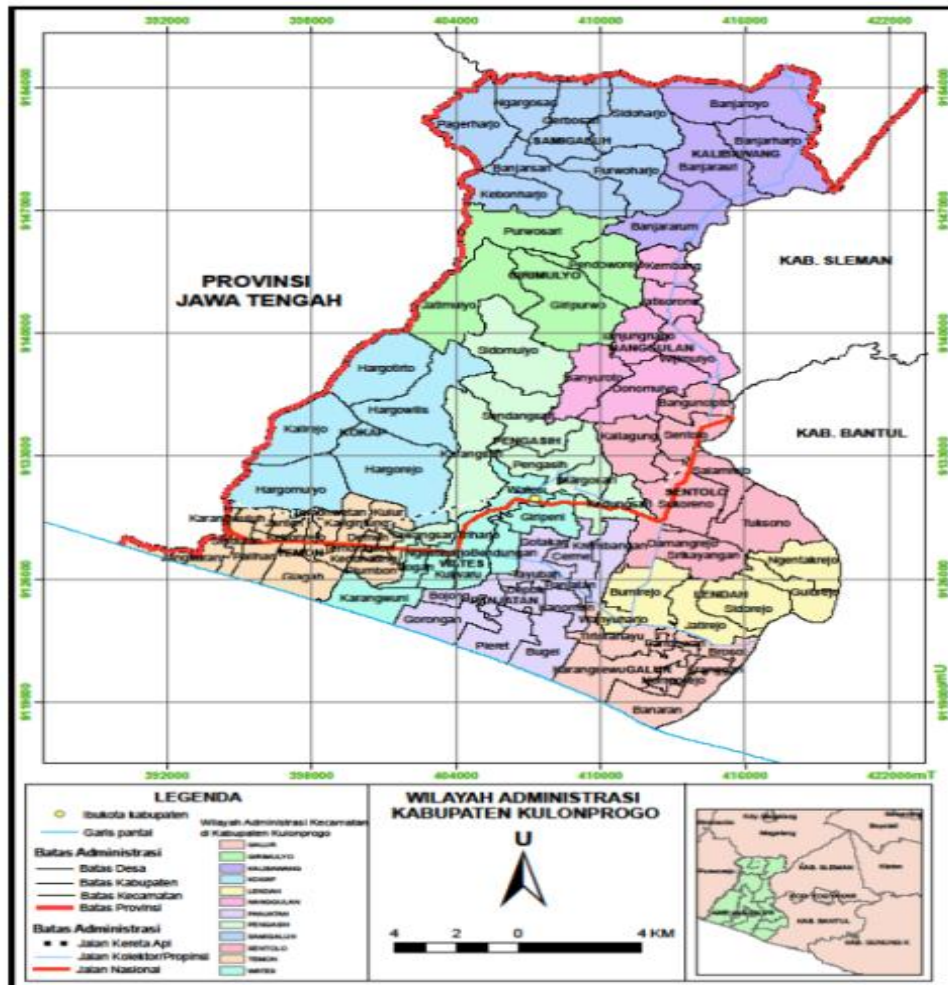
Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo yaitu Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di bagian utara, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian timur, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah di bagian barat, dan Samudera Hindia di bagian selata.¹ Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara $7^{\circ}38'30''$ - $7^{\circ}58'3''$ LS dan $110^{\circ}1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ BT.

Lokasi Kabupaten Kulon Progo dilihat secara posisi *geostrategic* mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat DI Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, merupakan 'pintu gerbang' Provinsi DI Yogyakarta yang menghubungkan DI Yogyakarta dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak dengan bagian barat Pulau Jawa dan utara

¹ Badan Pusat Statistik Kulon Progo, tahun 2015

Pulau Jawa. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari peta di bawa ini

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017

Selain itu posisi Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia juga dapat menghubungkan Provinsi DI Yogyakarta dengan negara tetangga yang terletak di bagian selatan

Indonesia seperti Australia.² Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan yaitu :

a. Kawasan pesisir

Kawasan pesisir pada Kabupaten Kulon Progo yaitu merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0-2%, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.

b. Kawasan dataran

Kawasan dataran pada Kabupaten Kulon Progo yaitu merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng antara 2-15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Kawasan pegunungan

Dan untuk kawasan pegunungan yaitu merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1000 meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang.³

² *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, tahun 2015*

³ *Badan Pusat Statistik, Kulon Progo, 2015*

Tabel 2.2.
Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1.	Temon	3.629,890	6,19
2.	Wates	3.200,239	5,46
3.	Panjatan	4.459,230	7,61
4.	Galur	3.291,232	5,61
5.	Lendah	3.559,192	6,07
6.	Sentolo	5.265,340	8,98
7.	Pengasih	6.166,468	10,52
8.	Kokap	7.379,950	12,59
9.	Girimulyo	5.490,424	9,36
10.	Nanggulan	3.960,670	6,76
11.	Kalibawang	5.296,368	9,03
12.	Samigaluh	6.929,308	11,82
Kabupaten Kulon Progo		58.623,512	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo ,2015

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang paling luas adalah kecamatan Kokap yaitu dengan luas 7.379,950 ha sedangkan luas wilayah kecamatan tersempit dilihat dari tabel diatas adalah kecamatan wates yaitu dengan luas 3.200,239 ha

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo sebesar 58.623,512 ha. Terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan. Untuk melihat jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Kulon Progo maka dapat melihat tabel administrasi pemerintahan Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 di bawah ini :

Table 2.3.
Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Kulon Progo tahun 2015

No	Variable	Jumlah
1	Kecamatan	12
2	Kelurahan	1
3	Desa	87
4	Luas wilayah	58.623,512 h

Sumber : Badan Pusat Statistic Kabupaten Kulon Progo, 2015

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan bahwa, Dari 12 jumlah Kecamatan 87 terdapat Desa dan 1 kelurahan.

Kabupaten Kulon Progo adalah asala satu bagian dari provinsi daerah Istimewah Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim mempunya periode yang berubah-ubah yang dipengaruhi oleh angin musiman yang biasanya periode perubahan anginya sekitar 6 bulan. Iklim musim terdiri dari dua jenis yaitu angina musim barat daya (muson barat) dan angina musim timur laut (muson timur). Pada bulan Oktober hingga April bertiup angina muson barat yang basah sehingga pada bulan tersebut terjadi hujan, pada bulan April hingga Oktober bertiup angina muson timur yang sifatnta kering sehingga dibulan-bulan tersebut terjadi musim panas. Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kabupaten Kulon Progo juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia maka terjadi

penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

2. Profil Bidang pengelolaan pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo

a. Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Kulon Pogo

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten kulon progo telah membentuk (BKDAD) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) Kabupaten Kulon Progo.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Badan Keuangan Dan Asset Daerah (BKDAD) Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pajak
- 2) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pendapatan
- 3) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Anggaran
- 4) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan
- 5) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Aset
- 6) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- 7) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Badan Keuangan Dan Asset Daerah (BKADA) didukung pegawai sebanyak 84 orang yang terdiri dari :

- 1) Berdasarkan jenis kelamin
 - a) Laki-laki : 43 orang
 - b) Perempuan : 41 orang
 - c) Jumlah : 84 orang

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah pegawai Badan Keuangan Dan Asset daerah (BKDAD), pegawai laki-laki lebih banyak di bandingkan dengan jumlah pegawai perempuan

2) Berdasarkan kepangkatan/golongan

- a) Golongan IV : 8 orang
- b) Golongan III : 60 orang
- c) Golongan II : 16 orang
- d) Jumlah : 84 orang

Dari data diatas bahwa dari jumlah pegawai 84 orang di bagi tiga berdasarkan golongan. Golongan IV 8 orang, golongan III 60 orang, dan golongan II 16 orang

3) Berdasarkan tingkat pendidikan

- a) S-2 : 7 orang
- b) S-1 : 36 orang
- c) D-III : 12 orang
- d) D-I : 1 orang
- e) SMA/Sederajat : 28 orang
- f) Jumlah : 84 orang

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan kepegawaian BKDAD Kulon Progo yang terbanyak yaitu pada tingkat pendidikan S-1 berjumlah 36 orang dari jumlah 84 orang pegawai⁴

⁴ BKDAD, bidang kepegawaian, tahun 2017

b. Bidang Perpajakan

Bidang Pajak terdiri dari Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Sub Bidang Penetapan, dan Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan. Dan mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan pajak
- 2) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan penetapan pajak
- 3) Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan penagihan dan pengawasan pajak

c. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan pendapatan, evaluasi dan pengendalian pendapatan serta pengembangan pendapatan.

- 1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pendapatan.
- 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian pendapatan.
- 3) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pendapatan.

d. Perkembangan Perpajakan dan PAD di Kabupaten Kulon Progo

Adapun perkembangan perekonomian ditopang oleh kegiatan ekonomi kabupaten Kulon Porogo yang tersebar secara sektoral dan spatial, sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat dengan adanya perluasan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. hal ini akan berdampak pada potensi yang semakin besar pada jenis-jenis pajaka yang akan dikumpulkan dari kegiatan ekonomi daerah.

Pada era desentralisasi fisik akan membawa dampak pada pemerintah yaitu keterbukaan dan perluasan kewenangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Dalam hal ini perkembangan dalam PAD akan mencerminkan kemampuan daerah dalam mendorong realisasi penerimaan daerah yang semakin meningkat. Dan kemudian sumber-sumber PAD (pajak daerah, redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah) yang ada dapat diperluas lagi sehingga dapat memberikan penerimaan yang optimal.

Sesuai hasil penelitian penulis bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi yang cukup besar untuk kedepannya. Sektor pajak dari pariwisata dan hotel menjadi sasaran yang paling dominan terhadap peningkatan PAD melalui sektor pajak untuk Kabupaten Kulon Progo